

**PERSEPSI PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PASCA DITETAPKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA
(Studi pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

BAMBANG HERMANTO

NIM. 122010337

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2017**

**PERSEPSI PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PASCA DITETAPKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA
(Studi pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

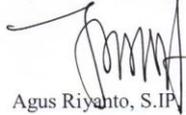
SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

BAMBANG HERMANTO
NIM. 122010337

Disetujui Oleh :
Pembimbing



Agus Riyanto, S.IP, M.Si

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasca Ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” ini telah dipertahankan dan disahkan di depan tim penguji Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Pada Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2017
Jam : 13.00 Wib
Tempat : Ruang siding FISIP

Skripsi ini benar-benar karya penyusun. Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan, penyusun bersedia bertanggungjawab atas segala konsekuensinya.

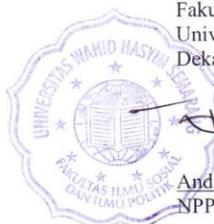
Tim Penguji

1. Agus Riyanto, SIP, M.Si
Ketua Tim Penguji
2. Zudi setiawan, S.IP, M.Si
Penguji Samping I
3. Harun Niam, S.IP, M.Si
Penguji Samping II

1.
2.
3.



Semarang, 14 Maret 2017
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Dekan,



Andi Purwono, S.IP, M.Si
NPP. 04.01.1.0048

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG HERMANTO

NIM : 122010337

Jurusan : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Persepsi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasca Ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar. Dan jika di kemudian hari terjadi kesalahan maka saya siap mempertanggungjawabkannya.

Semarang, 14 Maret 2017

Yang membuat pernyataan



Bambang Hermanto

MOTTO

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ
ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).¹

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَحْرَجْ

Artinya: Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah (Q.S. Al Kautsar [2])

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- Keluargaku tercinta
- Almamaterku
- Rekan-rekan satu angkatan

¹ Al-Qur'an Surat Luqman ayat 17 & Al-Kautsar ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah A-Qur'an Depag RI, Jakarta. 1995.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasca Ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”.

Penyusunan skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Noor Achmad, MA, Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Bapak Andi Purwono, S.IP, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang
3. Bapak Agus Riyanto, S.IP, M.Si, dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, masukan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Zudi Setiawan, S.IP, M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Politik
5. Seluruh dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis
6. Kepala Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Akhir kata, kritik dan saran demi lebih baik dan bermanfaatnya skripsi ini sangat peneliti harapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 14 Maret 2017

Penulis



Bambang Hermanto

ABSTRAKSI

Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui persepsi Pemerintah Desa dan BPD pasca ditetapkannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; 2) Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang akan muncul dengan adanya perubahan pengaturan BPD dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; DAN 3) Untuk mengetahui solusi terhadap dampak negatif dan kondisi apa yang diharapkan dengan adanya pengaturan baru terkait BPD.

Hasil penelitian menunjukkan kesiapan pemerintah desa Candisari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di anggap sudah cukup baik hal ini dilihat dari: (a) Kemampuan pemerintah desa Candisari dalam pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa; (b) Kemampuan pemerintah desa Candisari dalam perencanaan pembangunan desa sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes, dan 5 rencana program pembangunan desa yang telah dijalankan. Strategi yang dimiliki oleh pemerintah desa Candisari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu peningkatan kapasitas aparatur desa berupa pelatihan komputer, peningkatan motivasi kerja aparatur desa berupa motivasi moral dan intensif tambahan gaji pegawai, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa, berupa kegiatan sosialiasi dan pengadaan sistem informasi berbasis teknologi. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Candisari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni terdiri dari. Kendala internal dan kendala eksternal.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRACT



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Dasar Teori	10
1. Pemerintah Desa	10
2. Badan Permusyawaratan Desa	13

3. Peraturan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa	18
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Setting Penelitian	23
3. Informan Penelitian	23
4. Sumber Data	23
5. Metode Pengumpulan Data	24
6. Uji Keabsahan Data	26
7. Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan Skripsi	30
BAB II PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DI DESA CANDISARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	
A. Pemerintah Desa	32
1. Pengertian Pemerintah Desa	32
2. Landasan dan Unsur-unsur Pemerintah Desa	38
3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	41
4. Peranan Pemerintah Desa	47
B. Badan Permusyawaratan Desa	51
1. Fungsi BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	52

2. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	53
3. Fungsi BPD dalam Melaksanakan Pengawasan	54
C. Gambaran Umum Desa Candisari	58
1. Visi dan Misi	58
2. Kondisi Geografis	59
3. Demografis	60
4. Kondisi Ekonomi	61
5. Strategi dan Arah Kebijakan Desa	62
6. Arah Kebijakan Keuangan Desa	64
7. Proses Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Candisari	65
8. Struktur Organisasi BPD di Desa Candisari	66
9. Keanggotaan BPD Desa Candisari	71
10. Tingkat Pendidikan Anggota BPD Desa Candisari	71
11. Gambaran tentang BPD Berdasarkan Perundang-undangan	72
D. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Candisari	78
1. Tinjauan tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	78
2. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	84

3. Model Pemberdayaan yang ada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	87
4. Tujuan Pemberdayaan Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	90
 BAB III PERSEPSI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASCA DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DI DESA CANDISARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	
A. Persepsi Pemerintah Desa dan BPD Pasca Ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa	92
B. Peluang dan Tantangan yang Akan Muncul dengan Adanya Perubahan Pengaturan BPD dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa	99
C. Solusi Terhadap Dampak Negatif dengan Adanya Pengaturan Baru Terkait BPD	103
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Komponen dalam analisis data	29

